

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

LAPORAN TPID TRIWULAN 3 (KETIGA) TAHUN 2024 KABUPATEN LOMBOK BARAT

1. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH DAN ATAU PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING, BARANG LAINNYA DAN JASA SERTA RESIKO KE DEPAN.

Pada September 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,87. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,37 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,82 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,09 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,91 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,74 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,60 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,32 persen; kelompok transportasi sebesar 1,23 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,10 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,17 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,97 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan September 2024 sebesar 0,09 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) di bulan September 2024 sebesar 0,17 persen.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Nusa Tenggara Barat September 2024. September 2024 inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1,77 persen. Inflasi Year on Year (y-on-y) tertinggi terjadi di Kota Bima sebesar 2,49 persen.

Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Antar Wilayah Cakupan IHK Pada September 2024, seluruh wilayah IHK di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berjumlah 3 kabupaten/kota mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Bima sebesar 2,49 persen dengan IHK sebesar 106,46 dan terendah terjadi di Kabupaten Sumbawa sebesar 1,28 persen dengan IHK sebesar 105,55.

Berdasarkan press release BPS pada tanggal 1 Oktober 2024, inflasi nasional untuk inflasi bulan ke bulan (September 2024 terhadap Agustus 2024) berada pada angka -0,12%. Sedangkan untuk inflasi tahun ke tahun (September 2024 terhadap September 2023) berada pada angka 1,84%. Untuk inflasi bulan ke bulan (September 2024 terhadap Agustus 2024) Provinsi NTB berada pada angka 0,09%. Sedangkan untuk inflasi tahun ke tahun (September 2024 terhadap September 2023) Provinsi NTB berada pada angka 1,77%. Inflasi bulan ke bulan untuk Kota Mataram sebesar 0,08%. Sedangkan Inflasi tahun ke tahun sebesar 1,97%. Untuk Kabupaten Lombok Barat angka inflasi mengacu pada Kota Mataram.

Andil beberapa komoditas terhadap inflasi/deflasi Provinsi NTB pada September 2024, untuk inflasi : Akademi/Perguruan Tinggi, Ikan Layang/Ikan Benggol, Ikan Tongkol, Beras, dan Pisang. Sedangkan untuk komoditas penyumbang deflasi September 2024 diantaranya cabai rawit, cabai merah, bensin, terong, dan kol putih/kubis. Komoditas penyumbang inflasi/deflasi September 2024 (m-to-m) wilayah IHK Provinsi NTB yaitu pada Kota Mataram (Lobar mengacu pada Kota Mataram) untuk komoditas penyumbang inflasi : beras, pisang, upah

asisten rumah tangga, ayam hidup, dan bawang merah. Untuk komoditas penyumbang deflasi : cabai rawit, cabai merah, bensin, semangka dan kangkon.

DAFTAR HARGA KEBUTUHAN POKOK STRATEGIS BERDASARKAN DATA SP2KP BULAN
JULI S/D SEPTEMBER 2024 PADA KAB. LOMBOK BARAT

NO	JENIS BARANG	SATUAN	BULAN			KETERANGAN
			JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	
1	Beras Cap IR (Medium)	Kg	12.457	12.455	12.167	Stabil
2	Beras Cap Mataram (Premium)	Kg	13.000	13.214	12.643	Stabil
3	Beras Cap Padiku (Premium)	Kg	13.000	13.214	12.643	Stabil
4	Beras SPHP Bulog	Kg	12.000	12.000	11.667	Stabil
5	Kedelai Lokal,1 kg	Kg	16.000	15.545	14.286	Stabil
6	Kedelai Impor,1 kg	Kg	14.000	14.000	13.333	Stabil
7	Cabai Merah Keriting,1 kg	Kg	33.522	27.273	21.833	Tidak Stabil
8	Cabai Merah Besar,1 kg	Kg	27.609	25.000	21.024	Tidak Stabil
9	Cabai Rawit Merah,1 kg	Kg	54.043	45.136	26.286	Tidak Stabil
10	Cabai Rawit Hijau,1 kg	Kg	26.739	26.955	17.929	Tidak Stabil

11	Bawang Merah,1 kg	Kg	21.065	17.227	19.048	Tidak Stabil
12	Gula Pasir Curah, 1kg	Kg	17.000	16.750	16.190	Stabil
13	Gula Pasir Kemasan, 1kg	Kg	18.000	17.523	16.667	Stabil
14	Minyak Goreng Curah,1 lt	Kg	17.522	17.455	17.905	Stabil
15	Minyak Goreng Kemasan Premium,1 lt	Kg	18.000	18.000	18.857	Stabil
16	Minyakita,1 lt	Kg	17.000	17.000	16.190	Stabil
17	Tepung Terigu,1 kg	Kg	12.500	12.023	12.016	Stabil
18	Daging Ayam Ras Karkas,1 kg	Kg	35.130	35.000	33.333	Stabil
19	Telur Ayam Ras,1 kg	Kg	29.000	28.545	27.523	Stabil
20	Daging Sapi Paha Belakang,1 kg	Kg	123.696	122.273	119.048	Stabil
21	Daging Sapi Tetelan,1 kg	Kg	60.000	60.000	57.143	Stabil
22	Ikan Bandeng,1 kg	Kg	40.000	39.545	38.095	Stabil

23	Ikan Tongkol,1 kg	Kg	16.696	18.091	18.571	Stabil
24	Ikan Teri,1 kg	Kg	110.000	110.000	104.762	Stabil
25	Bawang Putih Honan,1 kg	Kg	35.261	34.045	33.286	Stabil
26	Bawang Putih Kating,1 kg	Kg	39.000	39.000	37.143	Stabil
27	Garam Halus,1 kg	Kg	10.000	10.000	9.524	Stabil
28	Susu Kental Manis, 370 gr	Kg	12.000	12.000	11.429	Stabil
29	Susu Bubuk (Setara Dancow),400 gr	Kg	40.000	40.000	38.095	Stabil
30	Udang Basah,1 kg	Kg	60.000	52.273	57.333	Stabil
31	Tomat,1 kg	Kg	4.435	2.000	2.762	Tidak Stabil
32	Kentang Sedang,1 kg	Kg	20.000	19.864	19.048	Stabil
33	Sawi Hijau,1 kg	Kg	8.000	8.000	7.619	Stabil
34	Kangkung,1 kg	Kg	6.000	6.000	5.714	Stabil

35	Ketimun Sedang,1 kg	Kg	5.000	5.000	4.762	Stabil
36	Kacang Panjang,1 kg	Kg	7.000	7.000	6.667	Stabil
37	Ayam Kampung Utuh,1 ekor	Kg	65.000	65.000	61.905	Stabil
38	Telur Ayam Kampung,1 kg	Kg	72.000	72.000	68.571	Stabil

Sumber Data : Disperindag Kab. Lobar

GRAFIK INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (IPH) KAB. LOMBOK BARAT BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2024



- Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang terjadi pada M4 bulan Juli berada pada angka 0,99% dan pada M1 Agustus mengalami penurunan menjadi -1,21%. Adapun komoditi yang mengalami penurunan diantaranya beras, tepung terigu, dan telur ayam ras disebabkan antara lain:
 - a. Efektivitas OPM dan sidak ke Gudang distributor
 - b. Panen padi di sebagian besar wilayah produsen
 - c. Usainya masa liburan sekolah menurunkan konsumsi Bapok di masyarakat
- Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang terjadi pada M4 bulan Agustus berada pada angka -1,98% dan masih mengalami penurunan pada M5 bulan Agustus mencapai -2,46%. Komoditi yang mengalami penurunan diantaranya beras, tepung terigu, dan telur ayam ras. Hal ini disebabkan antara lain:
 - a. Tanaman hortikultura mengalami penurunan harga utamanya cabai rawit yang sebelumnya mengalami kenaikan harga. Hal tersebut disebabkan oleh stok yang banyak setelah panen.

- b. Produksi udang basah meningkat yang juga menyebabkan stok udang basah melimpah.
- Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang terjadi pada M5 bulan Agustus berada pada angka -2,46% dan masih mengalami kenaikan pada M1 bulan September mencapai 0,32%. Komoditi yang mengalami kenaikan diantaranya beras, tepung terigu, dan telur ayam ras.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. harga rata-rata komoditas pangan Per- Minggu pada pedagang ecer di Pasar Induk Gerung Kecamatan Gerung Dari Bulan Juli Sampai Bulan September Tahun 2024 adalah sbb: pada minggu ke II Tahun 2024 harga bawang merah mulai mengalami penurunan harga sedikit demi sedikit di setiap minggunya. Dari harga Rp 27.667/Kg di Minggu I bulan September sampai harga Rp 15.000/Kg di Agustus Minggu I. dan mulai mengalami kenaikan dan penurunan harga lagi mulai dari Agustus minggu ke II pada Yang berkisar antar 16.000-18.000/Kg. Kenaikan harga harga bawang merah disebabkan karena pasokan yang kurang karena iklim, permintaan yang banyak karena menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya bawang merah, cabe rawit juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Mulai dari Minggu Ke II bulan Juli sampai dengan Agustus Minggu I yang berkisar mulai dari harga Rp 40.000/kg hingga hampir sampai Rp 70.000/kg. Sedangkan untuk komoditas pangan yang lain masih dalam keadaan harga yang stabil dan tidak ada kenaikan harga yang signifikan.

Berdasarkan hasil pemantauan tim survey harga pasar pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat, selama triwulan Ketiga Tahun 2024 kenaikan harga di bulan Juli yang signifikan untuk beberapa komoditi hortikultura diantaranya pada komoditas cabe merah besar, cabe keriting menembus sampai harga Rp 70.000,-/kg namun bawang merah diakhir minggu ke 2 - ke 4 menurun di posisi Rp 18.000,-/kg Bawang putih impor Rp 40.000,-/kg. Kenaikan cabe keriting dipicu oleh permintaan dari luar daerah dimana supply di Kabupaten Lombok barat termasuk sedikit karena baru selesai bongkar dan baru mulai penanaman yang baru di bulan juni. Komoditi tomat terjadi penurunan yang sangat signifikan di minggu ke 2 menembus angka Rp 3.000/kg dimana normalnya harga yang wajar berada diangka Rp 7.000/kg. Di bulan Mei komoditi bawang merah terus menurun dari minggu ke minggu dimana puncaknya pada minggu ke-3 Rp 15.000/kg dan mulai turun di minggu ke-4. Lonjakan harga beras yang signifikan terjadi di bulan agustus disebabkan oleh Tradisi perayaan Hari Besar Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Lombok Barat selama sebulan Penuh. Harga beras medium naik dari bulan sebelumnya Rp 1000,-/kg menjadi Rp 14.000/kg dan premium Rp 15.000/kg. Harga beras juga dipengaruhi dengan terjadinya Kenaikan harga GKP di tingkat petani. GKP (Gabah Kering Panen) di bulan Agustus-September merangkak naik diangka Rp 7.000 - 7.200 dan GKG Rp 8.500.

Berdasarkan hasil pemantauan tim survey harga pasar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, selama triwulan Ketiga Tahun 2024 harga tiap komoditi ikan relatif stabil. Pada komoditas pindang ikan tongkol mengalami Penurunan harga pada bulan Juli-September harga pindang ikan tongkol Rp 25.000 per keranjang (Isi 5 ekor). Menurunnya harga pindang ikan tongkol disebabkan musim ikan tongkol di wilayah Lombok Barat (Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong). Harga ikan tongkol segar Rp 15.000 - Rp. 18.000/kg. Harga udang segar ukuran sedang harga Rp 60.000/kg, Ikan bandeng Rp 40.000/kg Ikan Nila Rp 28.000/kg. Pada bulan September permintaan akan ikan cenderung meningkat karena memasuki hari besar keagamaan (Bulan Maulid).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

1. Berdasarkan monitoring di Pasar Gerung pada bulan Juli beberapa komoditas bahan pokok seperti (cabe merah besar, cabe rawit hijau, tomat, cabe rawit merah, dan bawang merah) cenderung mengalami kenaikan harga karena stok pasokan berkurang, karena di sebabkan pada bulan September adanya kegiatan hari besar keagamaan nasional (HBKN) menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW harga komoditas bahan pokok cenderung meningkat. Selama Triwulan ke III ini sebagian besar bahan kebutuhan pokok tetap stabil akibat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh TIM TPID Kab. Lombok Barat dengan melakukan operasi pasar murah/Gerakan Pangan Murah/Pasar Tani dan Sidak pasar serta sidak Gudang Distributor. Selain itu juga telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Upaya Pengendalian Inflasi Daerah Melalui Stabilisasi Harga Cabai di Kabupaten Lombok Barat Nomor :521.1/426.a/Diperta/VI/2024 Tanggal 10 Juni 2024 antara Dinas Pertanian Kab. Lobar dengan Petani Champion Cabai (H.Subhan) yang berada di Desa Kerongkong Kec. Suralage Kabupaten Lombok Timur sebagai tindak lanjut atas kerjasama antar daerah (KAD) atas penerbitan Kesepakatan Bersama (MOU) Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tentang Distribusi dan Pemasaran Pangan serta Pengembangan Potensi Daerah Nomor : 17 Tahun 2024 Nomor : 181.6/18/KS/KS/2024 tanggal 5 Juni 2024.
2. Untuk mengatasi ketersediaan pasokan yang berada di Kabupaten Lombok Barat Dinas Pertanian Kab. Lobar telah melakukan kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi, dan cetak sawah baru. Hal ini di tindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat Nomor : 188.4/166/Diperta/V/2024 tentang penetapan calon petani dan calon lokasi penerima bantuan alat dan mesin pertanian pada kegiatan bantuan alat dan mesin pertanian prapanen APBN Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana pertanian Kab. Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024. Adapun penerima bantuan akan diberikan kepada empat gapoktan yang berada di wilayah Kab. Lombok Barat.
3. Sebagai upaya penambahan produksi pangan melalui peningkatan indeks pertanaman dan produktifitas dari lahan sawah eksisting serta menambah luas baku sawah telah diusulkan CPCL untuk cetak sawah rakyat sementara baru dengan luas 20Ha pada Bapak Kementrian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat.
4. Telah terbit Keputusan Bupati terkait alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing kecamatan (Kep.Bupati Mo. 188.45/338/Diperta/2024). Hal ini ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Lombok Barat dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/362/DIPERTA/2024 Tanggal 27 Mei 2024. Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Gubernur. Penetapan alokasi pupuk di kabupaten berdasarkan data Luas Baku Sawah yang ada di Kabupaten Lombok Barat ditetapkan oleh bupati.
5. Permasalahan utama pengendalian inflasi Daerah diantaranya:
 - a. Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan, permasalahan daerah yang memiliki tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi.
 - b. Kesenjangan informasi dan distorsi struktur pasar, kesenjangan informasi antar pelaku ditengah panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga dipasar
 - c. Produktivitas pangan yang berkurang / tidak optimal karena adanya kendala iklim yang tidak menentu khususnya di Kabupaten Lombok Barat.
6. Selain itu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk

mensiasati dampak kenaikan beras yang melonjak tajam yang memicu kenaikan inflasi adalah dengan melakukan monitoring dan pengawasan kepada desa-desa agar tepat waktu dalam menyalurkan Dana BLT DD bagi masyarakat yang berhak menerima. Penyaluran BLT DD tepat waktu dan tepat sasaran ini akan berpengaruh dalam menjaga daya beli masyarakat serta menjaga agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti sembako dan penyediaan energy seperti elpiji 3 kilo.

7. Beberapa permasalahan pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat :
 - a. Produksi Pertanian yang Tidak Stabil: Fluktuasi produksi pertanian akibat bencana alam, perubahan iklim, atau penyakit tanaman dapat menyebabkan ketersediaan pasokan yang tidak stabil. Hal ini dapat memicu lonjakan harga dan berkontribusi terhadap inflasi.
 - b. Ketergantungan Terhadap Impor : Apabila daerah tersebut sangat bergantung pada impor bahan pangan, fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan perubahan kebijakan perdagangan internasional dapat berdampak negative pada harga pangan lokal dan inflasi seperti pada komoditi Bawang Putih dimana kita masih ketergantungan pada komoditi tersebut karena harga bawang putih lokal relatif tinggi mencapai 200% dari yang impor.
 - c. Infrastruktur Pertanian yang Tidak Memadai : Kurangnya infrastruktur pertanian seperti irigasi, transportasi, dan penyimpanan dapat menghambat efisiensi produksi dan distribusi produk pertanian. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi dan harga jual yang tinggi.
 - d. Spekulasi Pasar : Praktik spekulasi pasar yang tidak terkendali dapat menciptakan fluktuasi harga yang tidak stabil, terlebih dalam sektor pertanian. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan pasokan dan permintaan dan berdampak pada inflasi.
 - e. Kurangnya Regulasi dan Pengawasan : Lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap praktik bisnis di sektor pertanian dapat memungkinkan terjadinya manipulasi harga dan penyalahgunaan kekuasaan pasar. Hal ini dapat mempengaruhi inflasi di daerah tersebut.
 - f. Peningkatan Biaya Produksi: Kenaikan biaya produksi pertanian seperti pupuk, pestisida, dan tenaga kerja dapat mendorong petani untuk menaikkan harga jual produk mereka. Hal ini kemudian dapat berdampak pada inflasi di daerah tersebut.
 - g. Rendahnya Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi juga dapat menjadi permasalahan. Kurangnya pemahaman akan pentingnya stabilitas harga dapat membuat upaya pengendalian inflasi sulit dilakukan.
 - h. Ketimpangan Pendapatan : Adanya ketimpangan pendapatan antara masyarakat di daerah juga dapat mempengaruhi inflasi. Jika harga barang dan jasa naik namun sebagian besar masyarakat tidak mampu untuk membelinya, ini dapat menyebabkan ketegangan sosial dan juga berdampak pada inflasi.
- Dengan mengidentifikasi permasalahan di atas, langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah tersebut bisa difokuskan pada peningkatan produksi pertanian yang stabil, diversifikasi pasokan pangan lokal, peningkatan infrastruktur pertanian, penerapan regulasi yang ketat, serta pengawasan pasar yang lebih baik.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

3. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN

I. KETERJANGKAUAN HARGA

- MELAKUKAN OPERASI PASAR/GERAKAN PANGAN MURAH/PASAR TANI
- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM)/Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Tani bersinergi dengan Bank Indonesia (BI), Bulog dan OPD terkait secara berkala.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kegiatan operasi pasar menggunakan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi transportasi bagi pedagang yang mengikuti OPM/GPM/Pasar Tani. OPD yang melaksanakan OPM/GPM/Pasar tani diantaranya Disperindag, Dikpangan, dan Diperta.
- Melaksanakan kegiatan pemda menyapa desa secara berkala untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dirangkai dengan kegiatan OPM/GPM/Pasar Tani.
- Untuk kegiatan survey harga pasar dilakukan setiap hari oleh Disperindag, Dikpangan dan Diperta Kab. Lobar pada beberapa pasar. Data atas laporan indeks perkembangan harga (IPH) yang digunakan sebagai laporan Ke Kemendagri adalah data yang diperoleh dari Disperindag Kab.Lobar yang kemudian akan di laporkan ke Itjen Kemendagri oleh Inspektorat. Data terkait indeks perkembangan harga (IPH) Kabupaten Lombok Barat dapat diakses melalui <http://s.bps.go.id/iphlobar>. Dan untuk update harga Kabupaten Lombok Barat dapat diakses melalui <http://s.bps.go.id/updatepasarlobar>. Selain itu dapat juga diakses melalui <https://silakniki.lombokbaratkab.go.id/>

□ Jadwal Kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM), Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Tani bulan Juli s/d September 2024 yang dilaksanakan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat :

PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH (OPM)/ GERAKAN PANGAN MURAH (GPM)/ PASAR TANI BULAN AGUSTUS S/D SEPTEMBER 2024

NO	TANGGAL	LOKASI KEGIATAN	KETERANGAN
1	6 Agustus 2024	Halaman Kantor Dinas Pertanian Kab. Lobar	Dana BTT (Diperta) Kegiatan Pasar tani
2	14 Agustus 2024	Pasar Syariah Desa Dasan Baru Kec. Kediri	Dana BTT (Dikpangan) GPM
3	15 Agustus 2024	Halaman Kantor Desa Tempos Kec. Gerung	Dana BTT (Dikpangan) GPM
4	16 Agustus 2024	Gerbang BTN Pemda Kelurahan Dasan Geres Kec. Gerung	Dana BTT (Dikpangan) GPM
5	19 Agustus 2024	Halaman Kantor DPU-PU Kab. Lobar	Kegiatan Bazar Murah (DPU)
6	20 Agustus 2024	Lapangan Umum Narmada	Kegiatan Pemda Menyapa Desa Dinas PMD
7	25 Agustus 2024	Pantai Elak - Elak Sekotong	Kegiatan Dinas Pariwisata
8	10 September 2024	Halaman Kantor Desa Golong	Dana DBHCHT (Disperindag) OPM
9	11 September 2024	Halaman Kantor Desa Lembar Selatan	Dana DBHCHT (Disperindag) OPM
10	12 September 2024	Halaman Depan Hakata Gerung	Dana DBHCHT (Disperindag) OPM
11	18 September 2024	Halaman Kantor Desa Jagaraga	Dana DBHCHT (Disperindag) OPM

12	19 September 2024	Lapangan Desa Bajur	Dana DBHCHT (Disperindag) OPM
13	20 September 2024	Halaman Kantor Desa Tanak Beak	Dana DBHCHT (Disperindag) OPM
14	25 September 2024	Lapangan Brambangan Kecamatan Kuripan	Dana DBHCHT (Disperindag) OPM
15	26 September 2024	Perempatan Masjid Jami' Gelogor	Dana DBHCHT (Disperindag) OPM
16	27 September 2024	Halaman Kantor Camat Gunungsari	Dana DBHCHT (Disperindag) OPM

II. KETERSEDIAAN PASOKAN

• MELAKSANAKAN SIDAK PASAR DAN GUDANG DISTRIBUTOR

- Dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dilaksanakan kegiatan sidak pasar dan sidak Gudang distributor guna mengecek ketersediaan pasokan jelang hari raya.
- Melaksanakan pengecekan beras yang ada di Perum Bulog untuk mengantisipasi Ketersediaan Stok.
- Melakukan Operasi Pasar Beras SPHP Dari 4 pasar besarm yaitu Pasar Gerung yang menjadi salah satu acuan untuk melaksanakan Operasi Pasar dengan melibatkan Pimpinan beserta Kepala OPD yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah Kab. Lombok Barat. Pendropan Beras SPHP dilaksanakan 2 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari senin dan kamis dengan jumlah 1,5 - 2 ton per satu kali dropping untuk tiap mitra bulog.
- Memberikan Bantuan Pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM sebanyak 89.122). Masing- masing KPM menerima 10 kg/ bulan selama 6 bulan dengan total beras yang disalurkan sebanyak 891.220 Kg/bulan.
- Melakukan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan pembelian plastik kemasan untuk kegiatan Gerakan Pangan Murah yang dilakukan pada Dikpangan kab. Lombok Barat
- Melakukan kegiatan pompanisasi terkait penyelamatan tanaman padi oleh Diperta.
- Survei lokasi ke Bumdes terkait fasilitasi Bank Indonesia (BI) untuk pembangunan Green House dan Kios Banjar Getas.
- Penandatanganan Kerjasama Upaya Pengendalian Inflasi Daerah Melalui Stabilisasi Harga Cabai di Kabupaten Lombok Barat dengan Petani Champion Cabai di Desa Kerongkong Kec. Suralage Kabupaten Lombok Timur Pada Tanggal 10 Juni 2024
- Tindak lanjut kerjasama antar daerah (KAD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara.
- Gerakan Tanam

2.1 Data realisasi tanam PAT (Padi)

Dengan adanya bantuan pompanisasi dari APBN sebanyak 498 unit yang diperuntukkan untuk penyelamatan tanaman padi khususnya dan ada penambahan luas areal tanam padi baru seluas 1.274 ha.

2.2 Kegiatan untuk bidang hortikultura

Kegiatan yang sudah terlaksana antara lain adalah :

- a. Bantuan tanaman cabe dalam polybag kepada kelompok tani /kelompok wanita tani yang dilaksanakan di bulan Juli sebanyak 1500 polybag :
 - Kelompok Tani Gawah Pudak I sebanyak 600 polybag
 - Kelompok Tani Labuapi III sebanyak 300 polybag
 - KWT Bareng Baris sebanyak 300 polybag
 - KWT Melati sebanyak 300 polybag

Kondisi tanaman yang sekarang rata-rata terserang hama kutu kebul dan keriting daun akibat cuaca yang sangat panas dan perubahan iklim yang ekstrim (musim kemarau) sehingga tanaman menjadi kurang produktif (produksi rendah).

b. Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang sudah dilaksanakan adalah pelaksanaan tahap I terutama pembangunan rumah benih di 8 (delapan) desa yang lokasinya masuk ke dalam lokus stunting :

- KWT Pade Selamat Desa Midang Kec. Gunungsari
- KWT Sekuntum Mawar Desa Batu Kumbung Kec. Lingsar
- KWT Bareng Baris Desa Bug-Bug Kec. Lingsar
- KWT Srikandi Desa Gerimak Kec. Narmada
- Kelompok Tani Jeje Solah Desa Sembung Kec. Narmada
- KWT Bukti Bakti Desa Batukuta Kec. Narmada
- Pemuda Tani Milenial Betikar Desa Bengkel Kec. Labuapi
- KWT Muara Rezeki Desa Lembar Kec. Lembar

□ Jadwal Kegiatan sidak pasar dan Gudang distributor yang dilaksanakan dari bulan Juli s/d September 2024:

SIDAK PASAR DAN GUDANG DISTRIBUTOR BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2024

NO	TANGGAL	LOKASI KEGIATAN	KETERANGAN
1	23 Juli 2024	PT. Petrosida Gersik, PPI, PUSKUD NTB	Pengawasan dan Pemantauan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi
2	24 Juli 2024	Sasak Agro Tani & Sanghyang Seri,	Pengawasan dan Pemantauan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi
3	25 Juli 2024	Pasar Gerung Gudang Beras Bulog lembar	Sidak Pasar dan Gudang
4	26 Juli 2024	Gudang Minyak Goreng PT. Star	Sidak Gudang Minyak Goreng
5	11 September 2024	Pasar Gerung Gudang Beras Bulog lembar	Sidak Pasar dan Gudang
6	12 September 2024	Gudang Jembatan Baru (JB) Gudang Alfamart	Sidak Gudang

• KERJASAMA ANTAR DAERAH (KAD) PENGHASIL KOMODITI UNTUK KELANCARAN PASOKAN

□ Guna menjaga ketersediaan stok bahan pangan, pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) menjadi salah satu upaya yang efektif dalam memenuhi stok pangan di Kab. Lombok Barat yang sebagian besar masih bergantung dari daerah lain.

□ Melakukan koordinasi dengan Kabupaten Lombok Utara (KLU) terkait penandatanganan kerjasama antar daerah (KAD) yang akan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2024.

□ Penandatanganan Kerjasama Upaya Pengendalian Inflasi Daerah Melalui Stabilisasi Harga Cabai di Kabupaten Lombok Barat dengan Petani Champion Cabai di Desa Kerongkong Kec. Suralage Kabupaten Lombok Timur Pada Tanggal 10 Juni 2024.

**PERJANJIAN KERJASAMA
UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
MELALUI STABILISASI HARGA CABE
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**
Nomor : 521-1 / 426-A / 0-9111A / M / 2024

Pada hari ini senin tanggal sepuluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Damayanti Widyaningrum, S.P.M.Si
NIP : 19710518 199803 2 005
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat
Alamat : Jl. Permas Indah – Labuapi

Bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di Labuapi Lombok Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : H. Subhan
Jabatan : Champion Cabe Indonesia Kabupaten Lombok Timur
Alamat : Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga Lombok Timur

Bertindak atas nama Champion Cabe Indonesia Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan di Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga Lombok Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama untuk Pengendalian Inflasi Daerah melalui Stabilitas Harga Cabe di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

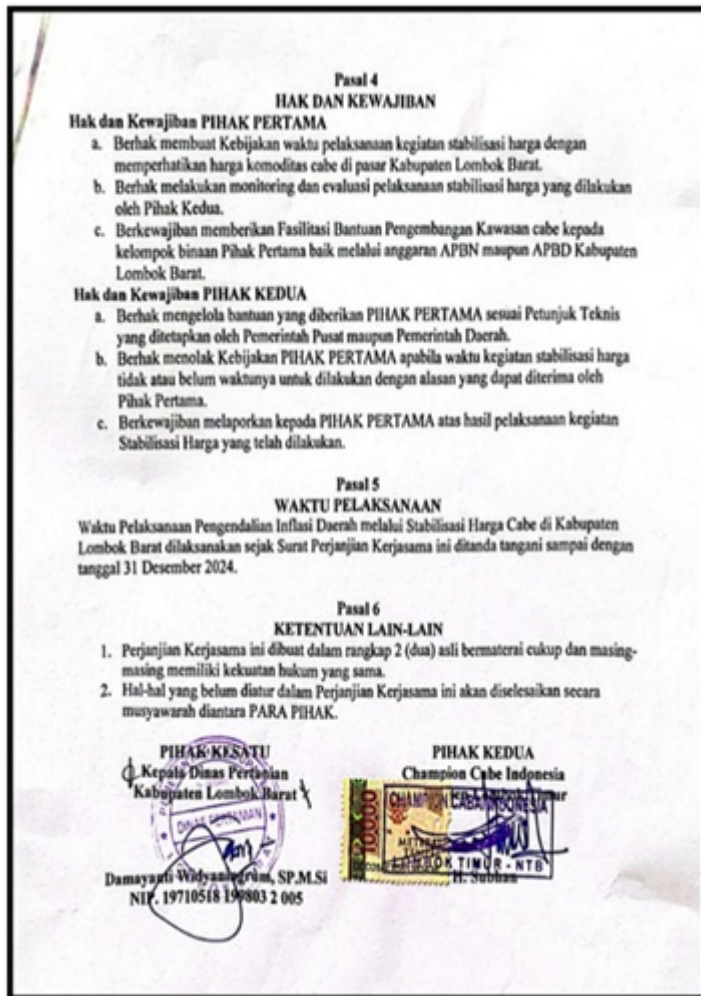
1. Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dimana Pihak Pertama mengikat Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa ada paksaan.
3. Champion Cabe adalah Petani sekaligus Pengusaha yang memiliki keahlian dalam budidaya maupun pemasaran cabe, sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitasi ketersediaan dan harga cabe baik Lokal maupun Nasional.

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai upaya mengendalikan terjadinya inflasi yang disebabkan oleh tingginya harga cabe pada waktu tertentu dengan melakukan stabilisasi harga ketika harga cabe di atas normal.
2. Harga cabe di atas normal adalah apabila harga cabe di pedagang pengecer di atas harga lima puluh ribu rupiah per kilogram.

**Pasal 3
BENTUK KEGIATAN**

1. Kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana Pasal 2 di atas adalah dengan melakukan Intervensi Pasar Komoditas Cabe.
2. Intervensi Pasar yang dapat dilakukan antara lain berupa Penambahan Pasokan Cabe (pada saat harga cabe diatas normal) di pasar besar Kabupaten Lombok Barat.
3. Melakukan Aksi "Menjual Cabe dengan Harga Petani" baik di pasar umum, pasar tradisional, tempat keramaian seperti acara organisasi Wanita/kemasyarakatan.



III. KELANCARAN DISTRIBUSI

- Pengaturan dan pengawasan kendaraan angkutan barang
 - ☐ Mengurangi biaya distribusi dan parkir angkutan barang
 - ☐ Mengurangi resiko bahaya dari aktifitas bongkar muat barang di jalan raya
 - ☐ Mengurangi kemacetan lalu lintas akibat adanya parkir liar sehingga distribusi komoditas utama semakin lancar
- Pengujian laik jalan kendaraan
 - ☐ Memastikan kendaraan angkutan orang dan barang yang beroperasi sudah laik jalan, sehingga resiko kecelakaan lalu lintas yang menghamat distribusi barang dapat dikurangi
- Penertiban areal Terminal
 - ☐ Memberikan akses bagi kendaraan barang yang mengangkut barang komoditas pangan untuk dibawa ke pasar tanpa dihalangi oleh pedagang bakulan yang menempati areal terminal
 - ☐ Mencegah kendaraan angkutan untuk menaikturunkan penumpang di badan jalan, yang dapat menimbulkan kemacetan di sekitar pasar
 - ☐ Menertibkan pengelolaan lapak terminal sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mencegah premanisasi dalam penetapan sewa lapak yang terlalu tinggi
- Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan dan fasilitas keselamatan jalan
 - ☐ Meningkatkan kualitas jaringan jalan-jalan strategis, agar tidak hanya mantap, namun juga berkeselamatan. Sehingga Mencegah terhambatnya distribusi komoditas pangan

3. KOMUNIKASI EFEKTIF

- RAPAT KOORDINASI/HIGH LEVEL MEETING (HLM) TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH (TPID)

- Pelaksanaan HLM TPID Kabupaten Lombok Barat di pimpin oleh Pj Bupati Lombok Barat dalam rangka antisipasi kenaikan harga.
- Melaksanakan rapat koordinasi TPID Kabupaten Lombok Barat Bersama dengan stakeholder terkait, setiap minggu dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
- Sinergi pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan forkompimda Kabupaten Lombok Barat.

- SHARING UPAYA PENGENDALIAN INFLASI MELALUI CAPACITY BUILDING TPID

- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah beberapa kali mendapatkan kunjungan terkait kegiatan capacity building TPID dimana Kabupaten Lombok telah mendapatkan penghargaan TPID award 2024 sebagai Kabupaten Berprestasi terhadap penyusunan Laporan TPID Tahun 2023. Diantaranya kunjungan dari TPID DIY, TPID Banyumas Raya, TPID Sumatera Utara, TPID Jawa Tengah, dan TPID Kediri.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4. EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

- Keterbatasan Anggaran bersumber APBD dalam pelaksanaan pengendalian Inflasi, terutama terhadap program subsidi transportasi untuk mendukung kegiatan distribusi dalam pelaksanaan operasi pasar/Gerakan pangan/Pasar tani.
- Masih terdapat kendala dalam pemeliharaan jaringan terhadap pengembangan Web Silakniki (sistem pelaporan harga terkini) untuk memberikan informasi terkait harga dan kegiatan dalam pengendalian inflasi serta melakukan bimtek kepada tenaga operator web silakniki.
- Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan.
- Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi serta indikasi surplus devisa pangan di masing-masing daerah.
- Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada Triwulan ketiga berupa pemberian subsidi transportasi pada saat pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Maulid Nabi saw di beberapa lokasi kecamatan.
- Terkait penyaluran BLT DD sampai dengan akhir bulan September 2024 sebagian besar Pemerintah Desa telah menyalurkan BLT DD ke masyarakat yang berhak menerima. Untuk itu pihak Dinas PMD tetap melakukan pemantauan dan tetap berupaya agar BLT DD dapat tersalur tepat waktu. Sedangkan untuk program ketahanan pangan sampai dengan bulan September baru sebagian pemerintah desa yang melakukan eksekusi, hal ini disebabkan karena untuk program ketahanan pangan ada kaitannya dengan proses perencanaan dan rembug kelompok masyarakat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

5. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

- Agar inflasi dapat terjaga berada pada kisaran angka sesuai target Nasional, sehingga dapat menjamin dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan terus melakukan pengecekan harga harian di pasar tradisional dan terus melaporkan hasil harga pasar kepada Pemerintah Pusat melalui SP2KP.
- Agar Tim TPID semakin solid melakukan upaya pengendalian inflasi di daerah dengan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti melakukan kegiatan operasi pasar, sidak pasar, Gerakan menanam, serta penggunaan dana BTT dalam pengendalian inflasi di daerah
- Agar pemanfaatan aplikasi digital seperti QRIS dan sejenisnya semakin dikembangkan sehingga dapat membantu Pemasaran produk UMKM melalui Aplikasi dan QR Code E-LAPAK SITEBEL dan QR Code E-LAPAK SITEBEL diharapkan dapat merambah hingga ke Hotel-Hotel yang berada di Lombok Barat.
- Dukungan dan perhatian Pemerintah Pusat terhadap pengendalian inflasi daerah semakin meningkat melalui pengalokasian dana, sarana dan prasarana dalam pengendalian Inflasi.
- Agar pemerintah pusat menetapkan Kebijakan impor dengan menekan jumlah barang yg masuk ke dalam negeri.
- Memfasilitasi kerjasama antar daerah (KAD), dengan mempertemukan dengan petani champion sehingga memudahkan dalam memenuhi kebutuhan di daerah yg sedang mengalami defisit komoditi.
- Memberikan Anggaran khusus utk pengendalian inflasi di daerah berupa pemberian dana DAK utk pembangunan sarana dan prasarana pertanian dan dana DID sebagai reward kepada daerah berprestasi yang mampu mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing
- Tetap menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat berupa beras dll yg selama ini telah dilakukan.
- Untuk menjaga kestabilan harga di sektor kelautan dan perikanan upaya yang dilakukan antara lain : Bantuan Bibit dan Pakan, Bantuan peralatan penangkapan, Fasilitas pembangunan pakan mandiri, dan fasilitas pembangunan unit pengolahan ikan. Memaksimalkan pemanfaatan gudang penyimpanan (cold storage) yang dapat memperpanjang masa penyimpanan produk perikanan sehingga gejolak harga dapat dikendalikan
- Intervensi pemerintah juga dibutuhkan dalam hal penyediaan anggaran untuk mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi seperti operasi pasar murah. Subsidi harga pada saat terjadi kenaikan harga ikan.
- Memaksimalkan pemanfaatan gudang penyimpanan (cold storage) yang dapat memperpanjang masa penyimpanan produk perikanan sehingga gejolak harga dapat dikendalikan.
- Mengupayakan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dapat tersalurkan tepat waktu agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
- Mengupayakan agar Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes) serta program Tanaman Pangan Lestari berjalan sesuai dengan rencana berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa di 119 desa se kabupaten Lombok Barat sesuai dengan road map.
- Memfasilitasi Masyarakat Desa agar memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Pengembangan Desa Wisata Sayur dapat segera terealisasi dengan memanfaatkan dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa yang berkoordinasi dengan dinas instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.
- Tidak meratanya harga sembilan kebutuhan (Sembako) ditengah-tengah masyarakat desa, karena dipengaruhi oleh faktor letak geografis desa masing-masing. Berdasarkan latar belakang tersebut Maka DPMD Kabupaten Lombok Barat selaku OPD yang langsung dan secara intens berhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan dengan Desa Desa Se Kab.

Lobar, kembali melakukan langkah-langkah yang strategis dengan semua OPD dan Instansi Vertikal yang melakukan pelayanan melalui : “ Pemda Menyapa Desa tahun 2024 “ .

- Rekomendasi kebijakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat :
 1. Meningkatkan efisiensi produksi pertanian dengan memperbaiki infrastruktur pertanian, meningkatkan akses ke teknologi pertanian yang modern, dan memberikan pelatihan yang berkualitas kepada petani.
 2. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menggalakkan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan, serta mengoptimalkan pengelolaan air dan lahan pertanian.
 3. Mendorong diversifikasi usaha pertanian dengan memberikan pelatihan kepada petani untuk mengembangkan komoditas pertanian yang beragam, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada satu komoditas saja.
 4. Memperkuat pasar pertanian dengan meningkatkan akses petani ke pasar yang lebih luas, memperbaiki infrastruktur pasaran, serta mengimplementasikan regulasi yang memungkinkan terciptanya pasar yang sehat dan berdaya saing.
 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas stok pangan dengan mengoptimalkan regulasi impor dan ekspor, serta mendorong keberlangsungan kegiatan riset dan pengembangan pertanian.
 6. Mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang sehat dan berkelanjutan, untuk mengurangi tekanan permintaan terhadap pangan dan mereduksi inflasi.
 7. Mendukung pembentukan koperasi pertanian, untuk membantu petani dalam memperoleh harga yang adil dan mengurangi biaya produksi.